

PENERAPAN ADAPTIVE GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SIAK TAHUN 2024

Oleh: Siti Nurhaliza

Pembimbing: Fadhiilatun Nisaa, M.I.P

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This study analyzes the implementation of Adaptive Governance in the governance of Siak Regency in 2024, focusing on the Smart Governance dimension, specifically the Public Service Mall (MPP) and the Bujang Kampung Program. Using the Adaptive Governance theory of Sharma-Wallace, Velarde, and Wreford (2018), the study emphasizes collaboration, coordination, social capital development, and capacity building. A qualitative descriptive approach was used through interviews and documentation.

The results indicate that the implementation of Adaptive Governance has been ongoing but is not yet optimal. Collaboration and coordination between agencies have been established, but are still hampered by uneven understanding and inconsistent attendance at Smart City forums. Social capital is built through satisfaction surveys and direct dialogue with the community, while capacity development remains hampered by limited human resources and budget.

Keywords: Adaptive Governance, Smart Governance, Smart City, MPP, Bujang Kampung

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi, dinamika sosial, dan meningkatnya tuntutan masyarakat mendorong pemerintah daerah untuk memiliki tata kelola yang adaptif. Di banyak daerah, birokrasi masih cenderung kaku, bekerja secara sektoral, serta lambat dalam merespons perubahan. Kondisi ini menyebabkan layanan publik kurang efektif dan menghambat upaya transformasi digital pemerintahan. Dalam konteks tersebut, pendekatan *Adaptive Governance* menjadi relevan karena menekankan fleksibilitas kebijakan, kolaborasi lintas sektor, peningkatan partisipasi publik, serta

kemampuan organisasi untuk belajar dan beradaptasi terhadap dinamika baru.

Kabupaten Siak merupakan salah satu daerah yang telah menerapkan konsep *Smart City* sejak 2017 melalui keikutsertaan dalam Gerakan 100 *Smart City* (G100SC). Pemerintah Kabupaten Siak menetapkan *Smart Governance* sebagai dimensi utama yang mendorong tata kelola pemerintahan berbasis teknologi, keterbukaan informasi, integrasi data, dan percepatan layanan publik. Tahun 2024 menjadi tahun penting karena merupakan fase keberlanjutan setelah Masterplan *Smart City* 2020–2023 berakhir.

Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Siak menetapkan dua quick

wins *Smart Governance*, yaitu Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Program Bujang Kampung. MPP berfungsi sebagai integrasi layanan berbagai instansi dalam satu gedung untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan publik. Sementara itu, Program Bujang Kampung menghadirkan layanan jemput bola ke desa-desa sehingga memperkuat keterjangkauan layanan, kedekatan pemerintah dengan masyarakat, serta responsivitas terhadap kebutuhan lokal.

Walaupun demikian, implementasi *Smart Governance* di Siak masih menghadapi sejumlah kendala. Sebagian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih memaknai *Smart City* hanya sebatas penggunaan aplikasi, sehingga koordinasi dalam integrasi data dan sistem belum berjalan optimal. Forum koordinasi *Smart City* juga sering dihadiri oleh perwakilan OPD yang berbeda-beda sehingga menghambat konsistensi penyelarasan kebijakan. Selain itu, pemahaman yang tidak merata mengenai konsep *Smart Governance* berdampak pada pelaksanaan program yang masih sektoral.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan *Smart Governance* di Kabupaten Siak memerlukan pendekatan yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berbasis pembelajaran. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana *Adaptive Governance* diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Siak pada tahun 2024 melalui dua program utama: Mal Pelayanan Publik dan Program Bujang Kampung.

2. KERANGKA TEORI

Adaptive Governance

Adaptive Governance merupakan pendekatan tata kelola yang menekankan fleksibilitas, responsivitas, serta kemampuan pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan dan tindakan sesuai perubahan lingkungan sosial, ekonomi, dan teknologi. Sharma-Wallace, Velarde, dan Wreford (2018) menyatakan bahwa *Adaptive Governance* memiliki empat indikator utama:

a. Kolaborasi

Melibatkan berbagai aktor seperti pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah dalam proses pembuatan keputusan. Kolaborasi diperlukan untuk mengatasi masalah yang kompleks dan saling terkait. Dalam konteks pemerintahan daerah, kolaborasi meningkatkan efisiensi layanan dan mengurangi tumpang tindih kewenangan.

b. Koordinasi

Merupakan proses penyelarasan tugas, fungsi, dan kebijakan antarinstansi agar kebijakan berjalan secara terintegrasi. Koordinasi dibutuhkan untuk mencegah fragmentasi layanan, meningkatkan sinergi antar-OPD, dan memastikan pelaksanaan program berjalan konsisten.

c. Membangun Modal Sosial

Modal sosial meliputi kepercayaan, jaringan, dan norma yang memfasilitasi kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Dalam *Adaptive Governance*, modal sosial menjadi fondasi keterlibatan publik, legitimasi kebijakan, serta efektivitas implementasi.

d. Pengembangan Kapasitas

Mengacu pada peningkatan kemampuan aparatur dalam bentuk kompetensi teknis, literasi digital, pemahaman konsep tata kelola modern, serta kesiapan organisasi menghadapi perubahan. Kapasitas adaptif penting

dalam era digital dan transformasi *Smart City*.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis penerapan *Adaptive Governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Siak tahun 2024 melalui program Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Bujang Kampung. Informan ditentukan dengan purposive sampling, meliputi Tim *Smart City*, OPD terkait, petugas MPP, pengelola Bujang Kampung, dan masyarakat pengguna layanan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi (regulasi, laporan, dan arsip kegiatan), kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Keabsahan data diperoleh melalui triangulasi sumber dan teknik untuk memastikan konsistensi antara wawancara, observasi, dan dokumen resmi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kolaborasi

Kolaborasi dalam penerapan *Adaptive Governance* pada program *Smart Governance* Kabupaten Siak tahun 2024 terlihat melalui integrasi lintas instansi dalam penyelenggaraan layanan publik. Pada Mal Pelayanan Publik (MPP), kolaborasi terwujud dari keterlibatan berbagai aktor seperti instansi pusat, perangkat daerah, BUMN/BUMD, lembaga perbankan, hingga organisasi layanan sosial yang bersama-sama menyediakan layanan terpadu di satu tempat. Kolaborasi ini memungkinkan masyarakat mengakses layanan secara lebih mudah, cepat, dan efisien. Namun, temuan penelitian

menunjukkan bahwa tidak semua instansi terlibat secara optimal; beberapa masih menjalankan tugas secara sektoral sehingga proses integrasi layanan tidak sepenuhnya merata. Selain itu, perbedaan kapasitas SDM dan pemahaman mengenai konsep *Smart Governance* juga memengaruhi kualitas koordinasi antarinstansi.

Pada Program Bujang Kampung, kolaborasi tampak dalam kerja sama horizontal antar-OPD yang secara bersama turun ke desa untuk memberikan layanan administrasi, kesehatan, kependudukan, perizinan, hingga konsultasi bantuan sosial. Kehadiran pimpinan daerah dalam kegiatan ini mendorong sinergi antarunit kerja sehingga pelaksanaan program lebih efektif. Meskipun demikian, kesiapan teknis tiap OPD masih berbeda, menyebabkan beberapa layanan tidak dapat dilakukan secara optimal di lapangan. Secara keseluruhan, kolaborasi antaraktor sudah terbentuk dan berjalan, namun masih membutuhkan penguatan khususnya dalam hal penyamaan pemahaman, komitmen kehadiran, serta integrasi sistem untuk mendukung implementasi *Smart Governance* yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

4.2 Koordinasi

Koordinasi dalam penerapan *Adaptive Governance* pada program *Smart Governance* Kabupaten Siak tahun 2024 menunjukkan bahwa proses penyelarasian tugas, kewenangan, dan alur kerja antarinstansi sudah terbentuk, namun belum berjalan secara konsisten. Pada Mal Pelayanan Publik (MPP), koordinasi dilakukan melalui pertemuan rutin, penyampaian laporan layanan, dan komunikasi lintas instansi untuk memastikan setiap loket menjalankan standar operasional pelayanan. Meski

demikian, koordinasi tidak selalu efektif karena pegawai yang bertugas di MPP bukan ASN Pemerintah Kabupaten Siak, melainkan pegawai dari instansi masing-masing, sehingga pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan langsung untuk menegur ketika terjadi ketidakhadiran atau keterlambatan petugas. Kondisi ini membuat kontrol terhadap kualitas layanan menjadi terbatas.

Sementara itu, pada Program Bujang Kampung, koordinasi relatif lebih solid karena setiap kegiatan dipimpin langsung oleh kepala daerah dan melibatkan OPD sesuai jenis layanan yang diberikan. Koordinasi dilakukan melalui penyusunan jadwal, pembagian tugas yang jelas, dan penyediaan fasilitas pendukung di lokasi pelayanan. Meski demikian, masih ditemukan kesenjangan kesiapan antar-OPD, seperti perbedaan kapasitas alat, keterbatasan personel, dan ketidaksiapan data. Forum *Smart City* yang seharusnya menjadi ruang koordinasi utama juga sering dihadiri oleh perwakilan OPD yang berbeda setiap pertemuan, sehingga menyebabkan tidak adanya kesinambungan informasi dan pengambilan keputusan. Secara keseluruhan, koordinasi sudah berjalan tetapi memerlukan penguatan komitmen, konsistensi kehadiran, serta integrasi sistem informasi untuk mendukung pelaksanaan *Smart Governance* yang lebih adaptif.

4.3 Membangun Modal Sosial

Membangun Modal sosial dalam penerapan *Adaptive Governance* pada *Smart Governance* Kabupaten Siak tahun 2024 terlihat dari upaya pemerintah membangun kepercayaan, kedekatan, dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat. Pada Mal Pelayanan Publik (MPP), modal

sosial dibangun melalui pelaksanaan survei kepuasan masyarakat yang dilakukan secara berkala untuk mengukur kualitas layanan dan menampung aspirasi sehingga pemerintah dapat menyesuaikan kebijakan layanan berdasarkan kebutuhan nyata pengguna. Selain itu, keterbukaan informasi dan komunikasi langsung antara petugas dan masyarakat membantu menciptakan interaksi yang lebih humanis dan memperkuat kepercayaan publik. Namun, temuan menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap seluruh layanan belum merata, terutama pada instansi yang masih menghadapi kendala teknis atau keterbatasan SDM, sehingga persepsi kualitas layanan masih bervariasi.

Pada Program Bujang Kampung, pembangunan modal sosial jauh lebih kuat karena adanya interaksi langsung pemerintah daerah dengan masyarakat desa. Kehadiran bupati dan perangkat daerah dalam kegiatan pelayanan keliling memperkuat kedekatan emosional, menciptakan rasa diperhatikan, dan meningkatkan legitimasi program. Dialog terbuka dalam kegiatan ini memungkinkan masyarakat menyampaikan keluhan, aspirasi, serta kebutuhan desa secara langsung, sehingga meningkatkan rasa memiliki dan partisipasi publik terhadap program pemerintah. Meskipun demikian, keterlibatan masyarakat masih cenderung bersifat reaktif—majoritas hanya hadir ketika membutuhkan layanan tertentu—belum pada tingkat partisipasi deliberatif atau pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pembangunan modal sosial sudah berjalan baik tetapi perlu diperkuat melalui mekanisme partisipatif yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.

4.4 Pengembangan Kapasitas

Pengembangan kapasitas merupakan elemen penting dalam *Adaptive Governance*, dan dalam konteks Kabupaten Siak tahun 2024, upaya peningkatan kapasitas aparatur sudah dilakukan namun belum sepenuhnya optimal. Pada MPP, pemerintah memberikan pelatihan dasar terkait penggunaan aplikasi layanan, sistem antrian, digitalisasi dokumen, dan standar pelayanan publik. Meski demikian, kapasitas teknis antarinstansi tidak merata; beberapa instansi memiliki SDM yang terampil dan responsif, sementara instansi lain masih bergantung pada tenaga teknis terbatas sehingga memperlambat proses layanan. Keterbatasan kompetensi digital ini menyebabkan integrasi sistem dan pemanfaatan teknologi tidak berjalan maksimal.

Dalam Program Bujang Kampung, tantangan kapasitas tampak pada kesiapan OPD menyediakan layanan secara mobile. Tidak semua OPD memiliki peralatan portabel atau personel yang cukup terlatih untuk memberikan layanan di luar kantor. Selain itu, kemampuan adaptasi aparatur terhadap situasi lapangan juga berbeda—misalnya dalam menghadapi kondisi geografis, keterbatasan jaringan internet, atau keragaman kebutuhan masyarakat. Faktor anggaran turut menjadi kendala karena tidak semua program peningkatan kapasitas dapat dilakukan secara rutin. Meskipun demikian, pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kompetensi melalui pelatihan internal, bimbingan teknis, serta penguatan koordinasi lintas sektor agar kapasitas adaptif aparatur semakin baik. Secara keseluruhan, pengembangan kapasitas telah berjalan namun membutuhkan peningkatan signifikan untuk

mendukung implementasi *Smart Governance* yang lebih responsif dan berkelanjutan.

5. KESIMPULAN

Penerapan *Adaptive Governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Siak tahun 2024 menunjukkan adanya pergeseran menuju tata kelola yang lebih fleksibel, kolaboratif, dan responsif, meskipun implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala. Melalui dua program quick wins—Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Bujang Kampung—pemerintah daerah berhasil menghadirkan layanan yang lebih dekat dengan masyarakat dan memperkuat integrasi antarinstansi, tetapi perbedaan persepsi, komitmen, dan kesiapan teknis antar-OPD masih menjadi hambatan.

Dari aspek kolaborasi, banyak aktor lintas instansi telah terlibat, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya merata karena beberapa instansi masih bekerja sektoral. Koordinasi antarinstansi sudah berlangsung melalui forum *Smart City* dan rapat teknis, tetapi konsistensi pelaksanaannya masih lemah akibat pergantian perwakilan OPD dan keterbatasan kewenangan pemerintah daerah terhadap instansi vertikal di MPP. Modal sosial menunjukkan tren positif melalui survei kepuasan dan interaksi langsung dalam Bujang Kampung, namun partisipasi masyarakat masih sebatas kebutuhan layanan, belum beranjak pada keterlibatan deliberatif. Pengembangan kapasitas aparatur juga telah dilakukan, tetapi perbedaan kompetensi digital, keterbatasan SDM, dan kendala anggaran tetap menghambat kualitas layanan.

Secara keseluruhan, penerapan *Adaptive Governance* di Kabupaten Siak telah menunjukkan kemajuan menuju

tata kelola yang lebih cerdas dan responsif. Namun, peningkatan komitmen lintas instansi, konsistensi koordinasi, perluasan partisipasi publik, serta penguatan kapasitas SDM dan infrastruktur digital masih diperlukan agar implementasi *Smart Governance* lebih efektif dan berkelanjutan.

6. DAFTAR PUSTAKA Buku

- Brunner, R., Steelman, T.A., Coe-Juell, L., Cromley, C.M., Edwards, C.M. and Tucker, D.W., 2005. *Adaptive Governance: integrating science, policy, and decision making*. Columbia University Press.
- Diduck, A., Armitage, D.R., Plummer, R., Diduck, A., Williams, A.T., Tudor, D.T., Randerson, P., Skaare, J.U., Depledge, M.H. and Kaminuma, T., 2010. Adaptive Capacity and Environmental Governance. *The learning dimension of adaptive capacity: Untangling the multi-level connections*. In *Adaptive capacity and environmental governance*, pp.199-221.
- Herawati, A. R. (2024). Buku Ajar: Governansi Digital dan Penerapan Teknologi Digital dalam Pelayanan Publik. Deepublish.
- Khamaludin, Angellia, F., Mandowen, S. A., Windyayarsi, V. S., Priyatno, A. M., Manurung, H. E., Yuniansyah, Amalia, A., Febrianto, R. W., & Judijanto, L. (2024). *Smart City Teori dan Penerapan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Mahmood, Z., Mahmood and Wheeler, 2018. *Smart Cities*. Springer
- Muhammad Sabri. (2024). *SMART CITY: Rahasia Kota Pintar, Bagaimana*

Teknologi Mengubah Kehidupan Perkotaan. Detak Pustaka.

- S. Anggraeni, F. (2023). Al Matin Adaptive Capability: Pendekatan Baru Dalam Teori Dynamic Capability. In *Al Matin Adaptive Capability: Pendekatan Baru Dalam Teori Dynamic Capability*. Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Umam, F., Suwarno, I., & Alfian, M. (2023). *Inovasi Kota "Memahami Konsep dan Praktik Smart City."* Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Zhang, K. and Shirowzhan, S., 2020. *Smart cities and construction technologies*. IntechOpen.

Jurnal

- Akamani, K. (2020). Integrating deep ecology and *Adaptive Governance* for sustainable development: Implications for protected areas management. *Sustainability (Switzerland)*, 12(14), 1–21.
- Arrozaaq, D. L. C., & Firmansyah, M. I. (2023). *Adaptive Governance or Status Quo? Unpacking the City of Jakarta's Approach to the Air Pollution Control Program*. *Jejaring Administrasi Publik*, 15(2), 123–134.
- Engkus, Alpin, Ajietya Hermawan Putra, Cici Oktariani, & Cyntia Puti Andriani. (2020). *Adaptive Governance* Badan Usaha Milik Desa Karya Mandiri Desa Cibodas Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 18(3), 23–33.
- Hasibuan, A., & Sulaiman, O. K. (2019). Smart Cit, Konsep Kota Cerdas Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Perkotaan

- Kabupaten/Kota, di Kota-Kota Besar Provinsi Sumatera Utara. *Buletin Utama Teknik*, 14(2), 127–135.
- Herawati, A. R. (2024). *Buku Ajar: Governansi Digital dan Penerapan Teknologi Digital dalam Pelayanan Publik*. Deepublish.
- Herdiyanti, A., Hapsari, P. S., & Susanto, T. D. (2019). Modelling the *Smart Governance* performance to support *Smart City* program in Indonesia. *Procedia Computer Science*, 161, 367–377.
- Janssen, M., & van der Voort, H. (2020). Agile and *Adaptive Governance* in crisis response: Lessons from the COVID-19 pandemic. *International Journal of Information Management*, 55(June), 102180.
- Khamaludin, Angellia, F., Mandowen, S. A., Windyasari, V. S., Priyatno, A. M., Manurung, H. E., Yuniansyah, Amalia, A., Febrianto, R. W., & Judijanto, L. (2024). *Smart City Teori dan Penerapan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Meilani, N. L. (2024). *Dinamika Adaptive Governance Dalam Pengelolaan Angkutan Massal Darat di Kota Pekanbaru*. 2(2), 481–497.
- Sharma-Wallace, L., Velarde, S. J., & Wreford, A. (2018). *Adaptive Governance good practice: Show me the evidence!* *Journal of Environmental Management*, 222(May), 174–184.
- Steve Hatfield-Dodds, R. N. and D. C. (2007). This document is discoverable and free to researchers across the globe due to the work of AgEcon Search . Help ensure our sustainability . *AgEcon Search*, 18. file:///F:/Spec 2/Traffic Delay Model.pdf
- Wibowo, H. A. (2018). Model of Academic Role in Supporting *Smart City* Implementation in Serang City. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*,
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Bupati Siak Nomor 104 Tahun 2018 Tentang Penerapan Masterplan
- Smart City* Kabupaten Siak
- Keputusan Bupati Siak Nomor 565/HK/2017 Tentang Perubahan Atas
- Keputusan Bupati Siak Nomor 460/HK/KPTS/2017 Mengenai Pembentukan Tim Pelaksana *Smart City* Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.
- Keputusan Bupati Siak Nomor 549/HK/KPTS/2017 Tentang Perubahan Atas
- Keputusan Bupati Siak Nomor 459/HK/KPTS/2017 Tentang Pembentukan Tim Dewan *Smart City* Pemerintah Kabupaten Siak